



Judul : Pariwisata punya rippda parnas Mana nih, peta jalan pendidikan nasional
Tanggal : Kamis, 17 November 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pariwisata Punya Rippda Parnas Mana Nih, Peta Jalan Pendidikan Nasional

WAKIL Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyayangkan Kemendikbudristek belum memiliki peta jalan pendidikan nasional. Kondisi ini kontras dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang sudah memiliki peta jalan untuk kebijakan pembangunan pariwisata nasional.

Fikri mengatakan, pihaknya sejak awal telah mendorong pembaharuan kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan klasik pendidikan, yakni terkait akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Komisi X yakin seabrek masalah pendidikan tersebut dapat diatasi jika Indonesia memiliki peta jalan pendidikan.

“Sehingga kebijakan pendidikan akan berjalan dan berkembang sesuai dengan peta yang telah disiapkan tanpa terusik oleh hiruk pikuk pergantian pemerintahan,” jelas Fikri membuka rapat dengar pendapat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) dan Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Temanggung di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sejatinya, lanjut dia, pemerintah telah memiliki kebijakan untuk sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sayangnya, untuk kebijakan peta jalan atau rencana induk pendidikan ini belum diserahterimakan dari Kemendikbudristek kepada Komisi X sebagai mitra kerja. Situasi ini kontras dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ternyata rencana induknya sudah ada.

“Karena sistem pendidikan kita sudah punya tapi rencana induk belum punya. Padahal kalau pariwisata ada Rippda Parnas (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan Nasional, red),” jelas politisi Fraksi PKS ini.

Dia menuturkan, pihaknya telah meminta Kemendikbudristek bisa menyusun dan menyerahkan rencana induk pendidikan nasional itu ke Komisi X DPR. Ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panja Sisdiknas yang selesai pada maret 2022 lalu.

Dalam salah satu poin rekomendasi, pihaknya meminta agar peta jalan pendidikan nasional direkonstruksi berdasarkan beberapa aspek. Yakni aspek filosofis, yuridis, sosiologis, pengambilan kebijakan, tata kelola pendidikan dan anggaran serta keterlibatan masyarakat.

“Sehingga peta jalan pendidikan ini menjadi kompas bagi negara dan pemerintah dalam membangun dunia pendidikan. Ini sebagai upaya memenuhi amanat UUD baik pembukaan sama batang tubuhnya pasal 31 dan 32,” jelasnya.

Fikri mengatakan, pihaknya juga telah menyelesaikan beberapa panitia kerja (Panja) terkait penuntasan masalah pendidikan. Di antaranya panja pendidikan vokasi, panja pembelajaran jarak jauh, panja Tenaga Kependidikan Honorar Guru dan Tenaga Kependidikan honorar menjadi ASN. Kemudian panja Merdeka Belajar dan kampus merdeka, panja formasi guru dan tenaga kependidikan 2022 dan panja kebijakan kurikulum. ■ KAL